

ISLAMIC SOCIETY IN THE QUR'AN AND ITS FORMATION IMPLEMENTATION BY HASMI**MASYARAKAT ISLAMI DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKANNYA OLEH HASMI****Saparno¹, Rahendra Maya²**Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor^{1,2}

jafarassafar@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of an Islamic society in the Qur'an and examine its implementation by the Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI). The research employs a qualitative method using a thematic Qur'anic interpretation (tafsir maudhu'i) and a case study approach. Data were collected through library research on the Qur'an, authentic hadiths, classical Qur'anic exegeses, HASMI's primary organizational documents, and in-depth interviews with the Heads of the Cadre Development Division, Organizational Affairs Division, and Information Technology Division of HASMI. Data were analyzed using content analysis through data reduction, data presentation, interpretation, and synthesis supported by source triangulation. The findings reveal that the Qur'anic concept of an Islamic society is founded upon seven fundamental principles: tawhid, obedience to Allah and His Messenger, implementation of Islamic law, Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah), enjoining good and forbidding evil (amar ma'ruf nahi munkar), justice, and social responsibility. HASMI implements these principles through programs of creed development, education and cadre training, media-based da'wah, organizational strengthening, social services, and digital da'wah initiatives. The study finds that da'wah strategy serves as the integrative element connecting all implementation programs. Rather than pursuing political power or violent means, HASMI develops an Islamic society through gradual (at-tadarruj) transformation based on da'wah, education, cadre development, and digital technology. This research proposes a da'wah-based social transformation model that integrates the Qur'anic concept of Islamic society with institutional implementation through peaceful, educational, and sustainable da'wah.

Keywords: *Islamic Society, Qur'an, Thematic Qur'anic Interpretation, HASMI, Da'wah, Social Transformation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an serta mengkaji implementasi pembentukannya oleh Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, dokumen primer HASMI, serta wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Kaderisasi, Kepala Bidang Struktural, dan Kepala Bidang Teknologi Informasi HASMI. Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan sintesis dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Islami menurut Al-Qur'an dibangun di atas tujuh karakteristik utama, yaitu tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, penegakan syariat, ukhuwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, dan kepedulian sosial. Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI diwujudkan melalui pembinaan tauhid, pendidikan dan kaderisasi, dakwah media, penguatan struktur organisasi, pelayanan sosial, serta pengembangan dakwah digital. Penelitian ini menemukan bahwa strategi dakwah merupakan unsur integratif yang menghubungkan seluruh implementasi tersebut. HASMI mengembangkan model pembentukan masyarakat Islami melalui transformasi individu dan masyarakat secara bertahap (*at-tadarruj*) melalui dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, bukan melalui pendekatan politik kekuasaan maupun kekerasan. Temuan ini melahirkan model da'wah-based social transformation, yaitu model pembentukan masyarakat Islami yang mengintegrasikan

konsep normatif Al-Qur'an dengan implementasi kelembagaan melalui dakwah yang damai, edukatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat Islami, Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, HASMI, Dakwah, Transformasi Sosial

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun minallāh*) dan sesama manusia (*ḥablun minannās*). Berbagai ayat Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip pembentukan masyarakat Islami yang berlandaskan tauhid, keadilan, ukhuwah, amar ma'ruf nahi munkar, musyawarah, dan kepedulian sosial, sehingga Islam hadir sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Āli 'Imrān [3]: 110).

Menurut Ath-Thabari, predikat *khairu ummah* diberikan karena umat Islam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan keimanan kepada Allah sebagai fondasi kehidupan sosial (Al-Ṭabarī, 2001a). Al-Qur'an juga menegaskan bahwa keimanan dan ketakwaan menjadi sebab turunnya keberkahan bagi suatu masyarakat (QS. Al-A'rāf [7]: 96) (Al-Sa'dī, 2000).

Di sisi lain, masyarakat Muslim kontemporer menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, materialisme, dan krisis moral yang berdampak pada melemahnya komitmen terhadap syariat, ukhuwah, serta kepedulian sosial. Al-Qur'an memperingatkan agar umat Islam tidak menjalankan agama secara parsial (QS. Al-Baqarah [2]: 85). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meninggalkan sebagian ajaran Islam akan menyebabkan kerusakan kehidupan individu maupun masyarakat (Ibn Kathīr, 2004a).

Dalam konteks tersebut, organisasi dakwah memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial melalui pendidikan, kaderisasi, pembinaan akidah, dakwah media, dan pelayanan sosial. Salah satu organisasi yang memiliki orientasi tersebut adalah Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI), yang menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Shalih sebagai landasan dakwahnya. HASMI menempatkan pembentukan masyarakat Islami sebagai tujuan utama dengan menjadikan dakwah sebagai strategi perubahan sosial melalui pembinaan akidah, pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan umat (DPP HASMI, 2016).

Kajian mengenai masyarakat Islami, dakwah, dan transformasi sosial telah banyak dilakukan oleh para sarjana. M. Dawam Rahardjo melalui *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan berorientasi pada transformasi sosial (M. Dawam Rahardjo, 1996). Sementara itu, Moh. Ali Aziz dan Munir serta Ilaihi mengembangkan konsep dakwah sebagai proses perubahan sosial melalui pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat (Ilaihi, 2006; Moh. Ali Aziz, 2017).

Penelitian-penelitian kontemporer juga menunjukkan perkembangan studi tafsir sosial dan dakwah di Indonesia, seperti kajian tentang dimensi sosial Al-Qur'an, dinamika tafsir dalam konteks sosial-budaya Indonesia, serta kontestasi dakwah Islam kontemporer. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas konsep masyarakat Islami, tafsir sosial, atau strategi dakwah secara terpisah dan belum mengintegrasikan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an dengan implementasinya pada organisasi dakwah tertentu, khususnya HASMI (Muhlis & Hannan, 2023; Mujiono, 2023; Zulliandi, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis integratif antara konsep normatif masyarakat Islami dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam strategi dakwah HASMI.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat research gap, yaitu belum adanya penelitian yang menghubungkan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an dengan implementasi pembentukannya melalui gerakan dakwah organisasi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty berupa integrasi pendekatan tafsir maudhu'i, teori dakwah,

dan studi organisasi Islam untuk menganalisis implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani konsep normatif Al-Qur'an dengan praktik dakwah kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'i menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah, mengkaji implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir sosial Al-Qur'an dan strategi dakwah Islam melalui analisis hubungan antara konsep normatif masyarakat Islami dengan implementasinya dalam program dakwah HASMI. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sedangkan secara praktis menjadi referensi bagi lembaga dakwah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan pembinaan masyarakat Islami yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan studi kasus (case study) mengenai implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an melalui analisis Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur Ahlussunnah wal Jama'ah, dokumen resmi HASMI, serta artikel ilmiah yang relevan (Creswell, J. W., & Creswell, 2018b).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, dan dokumen resmi HASMI, serta data sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu menghasilkan data yang stabil, kontekstual, dan dapat diverifikasi melalui berbagai sumber tertulis (Bowen, 2009; Creswell, J. W., & Poth, 2018; Sugiyono, 2022).

Analisis data menggunakan content analysis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan **tafsir maudhu'i (tematik)** dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep masyarakat Islami, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan konteks, munāsabah, serta penafsiran para ulama. Selanjutnya, hasil penafsiran diinterpretasikan menurut manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' salaf, kemudian dikomparasikan dengan implementasinya dalam program dakwah HASMI melalui analisis terhadap dokumen organisasi dan data hasil wawancara (Al-Farmawī, 1977; Al-Shāṭibī, 1997a; DPP HASMI, 2017; HASMI, 2023b; A. ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, 1995; Lajnah Ilmiah HASMI, 2014).

Keabsahan data dijaga melalui **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, literatur Ahlussunnah wal Jama'ah, dokumen resmi HASMI, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan **kredibilitas (credibility)**, konsistensi, dan keabsahan temuan penelitian kualitatif (Creswell, J. W., & Creswell, 2018a; Lincoln, Y. S., & Guba, 1985; Patton, 1998).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONSEP MASYARAKAT ISLAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Tauhid sebagai Fondasi Masyarakat Islami

Tauhid merupakan pondasi utama masyarakat Islami yang menjadi dasar seluruh aspek kehidupan, meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Karena itu, masyarakat Islami tidak hanya ditandai oleh identitas keislaman, tetapi juga menjadikan tauhid sebagai landasan berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hanafī, 1998; Ibn Taymiyyah, 1998). Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah, tauhid meliputi rububiyyah, uluhiyyah, dan al-asmā' wa aṣ-ṣifāt yang menjadi satu kesatuan dalam membentuk keimanan dan kehidupan masyarakat (Al-Hanafī, 1998; Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, 2004).

Allah Ta'ālā berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"Dan sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul (yang menyerukan): 'Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.'" (QS. An-Naḥl [16]: 36).

Menurut Ath-Thabari, ayat ini menegaskan bahwa seluruh rasul memulai dakwahnya dengan tauhid dan menjauhi thaghut, sehingga tauhid menjadi fondasi seluruh ajaran Islam dan titik awal perubahan masyarakat (Al-Ṭabarī, 2001a). Ibnu Katsir menambahkan bahwa seluruh kerusakan moral dan sosial berakar pada penyimpangan tauhid, sehingga pembinaan akidah harus didahulukan sebelum aspek syariat lainnya (Ibn Kathīr, 2004a).

Allah juga berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56).

Ibnu Abbas menafsirkan لِيَعْبُدُونِ dengan makna لِيُؤَحِّدُونِ, yakni agar manusia mentauhidkan Allah. As-Sa'di menjelaskan bahwa ibadah mencakup seluruh bentuk ketaatan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga tauhid menjadi orientasi seluruh kehidupan individu maupun masyarakat (Al-Sa'dī, 2000; Al-Ṭabarī, 2001a).

Konsep ini diperkuat oleh hadis Rasulullah ﷺ ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman:

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah..." (Al-Bukhārī, 2002; Al-Ḥajjāj, 2006).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tauhid sebagai kewajiban pertama yang harus diajarkan sebelum syariat lainnya, sedangkan Ibnu Hajar menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ menerapkan metode dakwah secara bertahap (*at-tadarruj*) dengan mendahulukan pembinaan akidah (Al-Nawawī, 1972c; Ibn Hajar al-'Asqalānī, 2001).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga." (HR. Muslim No. 26).

Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan seseorang bergantung pada ilmu dan keyakinan yang benar terhadap kalimat tauhid, yang harus diwujudkan dalam keimanan dan pengamalannya sesuai tuntunan syariat. Dengan demikian, pengetahuan tentang tauhid bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus melahirkan komitmen terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (Al-Nawawī, 1972a).

Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa seluruh risalah para nabi dan syariat Islam bertujuan menegakkan tauhid serta memurnikan ibadah kepada Allah. Penyimpangan akidah menjadi sebab munculnya berbagai bentuk kerusakan moral dan sosial

karena manusia meninggalkan tujuan utama penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah semata (Ibn Taymiyyah, 1995)

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuryanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan berbasis tauhid merupakan fondasi pembentukan karakter religius. Internalisasi nilai-nilai tauhid membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial sehingga pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan kepribadian Islami (Nuryanti et al., 2024).

Hasil pembahasan ini juga didukung oleh penelitian Rosadi et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa tauhid merupakan substansi utama pendidikan Islam. Tauhid menjadi landasan integrasi dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial sehingga membentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat (Rosadi et al., 2023).

Analisis dan sintesis pembahasan menunjukkan bahwa tauhid merupakan fondasi utama masyarakat Islami menurut Al-Qur'an yang menjadi titik awal pembinaan individu dan perubahan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah menegaskan bahwa seluruh rasul memulai dakwah dengan peneguhan tauhid sebelum penegakan syariat dan pembinaan aspek kehidupan lainnya, sehingga tauhid berfungsi sebagai dasar pembentukan orientasi spiritual, moral, dan sosial umat (Al-Ṭabarī, 2001; Ibn Kathīr, 2004; Al-Nawawī, 1972a; Ibn Taymiyyah, 1995). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuryanti et al. (2024) dan Rosadi et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai tauhid membentuk karakter religius, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tauhid dapat disintesis sebagai fondasi konseptual masyarakat Islami yang mengintegrasikan dimensi akidah, akhlak, dan kehidupan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Keimanan yang benar harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama akidah, hukum, akhlak, dan pedoman hidup. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa hakikat ibadah adalah menaati Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin, serta menjadikan wahyu sebagai dasar seluruh aspek kehidupan (A. ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, 1995). Senada dengan itu, Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan syariat hanya dapat diwujudkan melalui komitmen untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan hawa nafsu maupun bid'ah. Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah, konsekuensi syahadat menuntut penghambaan kepada Allah semata dan ittibā' kepada Rasulullah ﷺ sehingga seluruh aktivitas manusia berlandaskan wahyu, bukan tradisi atau pendapat yang menyelisihi syariat (Al-Shātibī, 1997b; Al-'Izz, 1998; A. ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, 1995).

Allah Ta'ālā berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu." (QS. Muhammad [47]: 33).

Menurut Al-Ṭabarī, pengulangan lafaz أَطِيعُوا menunjukkan penegasan kewajiban menaati Rasulullah ﷺ sebagaimana menaati Allah, sedangkan larangan لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ mengandung peringatan agar orang beriman tidak merusak amal mereka dengan kemaksiatan, kemurtadan, atau penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya (Al-Ṭabarī, 2001c). Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keikhlasan dan ittibā' kepada Rasulullah ﷺ, karena amal hanya diterima apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah ﷺ (Ibn Kathīr, 2004c).

Allah Ta'ālā berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Ḥasyr [59]: 7).

Menurut Al-Qurṭubī, meskipun ayat ini turun berkaitan dengan pembagian harta *fa'i*, lafaznya bersifat umum sehingga mencakup seluruh perintah dan larangan Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu landasan utama kewajiban mengikuti Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an dan sumber hukum setelahnya (M. ibn A. Al-Qurṭubī, 2006). Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Kathīr, yang menegaskan bahwa setiap perintah Rasul wajib ditaati dan setiap larangannya wajib ditinggalkan karena Sunnah merupakan penjelas dan implementasi ajaran Al-Qur'an (Ibn Kathīr, 2004a).

Prinsip tersebut dipertegas oleh sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

"Barang siapa menaati aku, maka sungguh ia telah menaati Allah. Dan barang siapa mendurhakai aku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah." (HR. al-Bukhari No. 7137; Muslim No. 1835).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara; kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku." (Diriwayatkan oleh al-Ḥākim dalam *Al-Mustadrak* (no. 319), dan dinilai sahih oleh al-Ḥākim serta disepakati oleh al-Dzahabī).

Imam An-Nawawī menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah ﷺ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis tentang kewajiban menaati pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Sementara itu, Al-Syāṭibī menegaskan bahwa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar dalam menjaga agama dari penyimpangan (*bid'ah*) serta menjadi standar dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar (Al-Nawawī, 1972b; Al-Shāṭibī, 1997c).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian yang menempatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai landasan pembentukan karakter Islami. Rosadi et al. (2023) menegaskan bahwa tauhid membentuk kesadaran spiritual yang diwujudkan dalam kepatuhan kepada Allah dan Rasul serta tanggung jawab sosial (Rosadi et al., 2023). Sejalan dengan itu, Nursalim et al. (2023) dan Munir dan Jamal (2023) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keislaman melalui pendidikan dan pembinaan mampu membentuk karakter religius, akhlak mulia, serta kepatuhan terhadap syariat. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah dan Rasul tidak hanya merupakan kewajiban teologis, tetapi juga menjadi fondasi pendidikan karakter dan pembentukan masyarakat Islami berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah (Eko Nursalim, 2021; Munir & Jamal, 2023; Rosadi et al., 2023).

Analisis dan sintesis pembahasan menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan karakteristik esensial masyarakat Islami yang menjadi indikator keimanan sekaligus landasan seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, dan penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasul merupakan konsekuensi dari ketaatan kepada Allah, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber utama dalam menentukan keyakinan, ibadah, akhlak, dan perilaku sosial (Ath-Thabari, 2001; Al-Qurthubi, 2006; An-Nawawī, 1972; Ibnu Taimiyah, 1995). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Rosadi et al. (2023), Nursalim et al. (2023), dan Munir dan Jamal (2023) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai ketaatan melalui pendidikan Islam membentuk karakter religius, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dapat disintesis sebagai fondasi normatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam pembentukan masyarakat Islami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

C. Penegakan Syariat sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup aspek muamalah, sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, hingga tata kelola kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Islami adalah masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-syarī'ah*), sedangkan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa seluruh urusan kehidupan harus diselenggarakan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Al-Shāṭibī, 1997d; Ibn Taymiyyah, 1998). Senada dengan itu, Al-Maududi menjelaskan bahwa syariat Islam merupakan sistem hidup yang bersifat menyeluruh (*comprehensive way of life*) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan kehidupan bermasyarakat (Al-Maududi, 1984).

Allah Ta'ālā berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (QS. Al-Mā'idah [5]: 48).

Menurut Al-Ṭabarī, ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi rujukan yang mengawasi (*muhaymin*) seluruh syariat terdahulu. Oleh karena itu, perintah *فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ* menunjukkan kewajiban menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah serta larangan mengikuti ketentuan yang bertentangan dengannya (Al-Ṭabarī, 2001b). Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Ibn Kathīr, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang sempurna dan menjadi standar dalam memutuskan seluruh perkara, sedangkan Al-Qurṭubī menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban berhukum dengan syariat Allah dan meninggalkan hukum yang bertentangan dengan wahyu (M. A. A. Al-Qurṭubī, 2006; Ibn Kathīr, 2004b).

Prinsip tersebut ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah ﷺ :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمُورَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara; kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Mālik dalam *Al-Muwatṭa'* secara mursal dan juga oleh Al-Ḥākim dalam *Al-Mustadrak* (no. 319), yang dinilai sahih oleh Al-Ḥākim serta disepakati oleh Al-Dzahabī. Hadis tersebut menegaskan bahwa keselamatan umat bergantung pada komitmen berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam (Al-Ḥākim al-Naysābūrī, 1990; Anas, 1985). Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa syariat Allah mencakup seluruh aspek kehidupan dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi dasar dalam kehidupan individu maupun masyarakat (A. ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, 1995).

Hasil pembahasan ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam diwujudkan melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Islam. Mahendra (2024) menjelaskan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pendidikan berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan itu, Hardianto dan Fata (2025) serta Miftahussurur et al. (2025) menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* membentuk karakter, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar terwujudnya kemaslahatan. Dengan demikian, penegakan syariat dipahami sebagai proses pembinaan nilai dan karakter yang menjadi fondasi masyarakat Islami (Hardianto & Fata, 2025; Mahendra, 2025; Miftahussurur et al., 2025).

Analisis dan sintesis pembahasan menunjukkan bahwa penegakan syariat merupakan karakteristik utama masyarakat Islami yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai

sumber utama dalam seluruh aspek kehidupan. Penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga penerapannya mencakup dimensi ibadah, hukum, dan kehidupan sosial (Al-Ṭabarī, 2001; Al-Shāṭibī, 1997; Ibn Taymiyyah, 1995). Temuan ini diperkuat oleh Mahendra (2024), Hardianto dan Fata (2025), serta Miftahussurur et al. (2025) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* membentuk karakter, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penegakan syariat merupakan fondasi konseptual masyarakat Islami yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, hukum, dan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

D. Persatuan (Ukhuwah) sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Persatuan (*ukhuwah Islāmiyyah*) merupakan karakteristik utama masyarakat Islami yang dibangun di atas ikatan akidah, melampaui perbedaan suku, bangsa, dan status sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan utama persatuan umat, bukan fanatisme golongan, ras, maupun kepentingan duniawi. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa persatuan hanya dapat terwujud apabila umat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjauhi perpecahan akibat hawa nafsu dan bid'ah (Ibn Taymiyyah, 1995). Senada dengan itu, Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariat adalah menjaga persatuan umat dan mencegah segala bentuk perpecahan yang bersumber dari hawa nafsu dan penyimpangan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Shāṭibī, 1997d).

Menurut Al-Ṭabarī, frasa *حَبْلُ اللَّهِ* mencakup agama Allah, perjanjian-Nya, dan Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin. Perintah untuk berpegang teguh kepada *ḥablullāh* menunjukkan kewajiban menjaga persatuan umat di atas kebenaran wahyu, sedangkan larangan berpecah belah merupakan peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan yang menyelisihi petunjuk Allah (Al-Ṭabarī, 2001a). Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ibn Kathīr, yang menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melarang segala bentuk perpecahan dalam agama (Ibn Kathīr, 2004a).

Prinsip ukhuwah tersebut dipertegas dalam sabda Rasulullah ﷺ :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya (dalam kesulitan)." (HR. al-Bukhari No. 2442; Muslim No. 2580).

An-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini mewajibkan kaum muslimin menjaga hak sesama, saling menolong, dan menghindari kezaliman sebagai wujud ukhuwah Islamiyah (Al-Nawawī, 1972a). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa persatuan umat hanya dapat terwujud di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, sedangkan fanatisme golongan dan penyimpangan dari wahyu menjadi penyebab utama perpecahan (Ibn Taymiyyah, 1995).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, dan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah, dapat dianalisis bahwa ukhuwah merupakan konsekuensi dari tauhid dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Persatuan umat terwujud dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan persaudaraan sehingga terhindar dari perpecahan. Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah menjadi pilar masyarakat Islami yang melahirkan solidaritas dan stabilitas sosial. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI melalui pembinaan ukhuwah, kaderisasi, dan dakwah sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

E. Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat Islami yang berfungsi menjaga kemurnian akidah, akhlak, dan kehidupan sosial. Al-Qur'an menempatkannya sebagai identitas khairu ummah, karena melalui prinsip ini umat terdorong

untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Maududi, 1984, hlm. 92–96).

Allah Ta'ālā berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar." (QS. Āli 'Imrān [3]: 104).

Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan adanya kelompok yang berdakwah dan memperbaiki masyarakat agar agama dan kehidupan sosial tetap terpelihara (Al-Ṭabarī, 2001a). QS. Āli 'Imrān [3]: 110 juga menegaskan bahwa predikat khairu ummah diberikan kepada umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atas dasar keimanan kepada Allah (Ibn Kathīr, 2004a).

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya..." (HR. Muslim No. 49).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban sesuai kemampuan dan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan maslahat, sedangkan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pelaksanaannya harus dilandasi ilmu, hikmah, kesabaran, dan keikhlasan agar mendatangkan kemaslahatan (Al-Nawawī, 1972a; Ibn Taymiyyah, 1995).

Analisis menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan mekanisme utama dalam menjaga kemurnian akidah, akhlak, dan ketertiban sosial. Melalui prinsip ini, masyarakat terdorong untuk menguatkan komitmen terhadap ajaran Islam sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan implementasi praktis dari tauhid, ketaatan, penegakan syariat, dan ukhuwah. Melalui dakwah dan pembinaan yang berkesinambungan, masyarakat Islami mampu menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus membangun kehidupan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI melalui dakwah, kaderisasi, pendidikan, dan pembinaan umat sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

F. Keadilan sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat Islami. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pemerintahan, dan hubungan sosial. Karena itu, masyarakat Islami adalah masyarakat yang memenuhi hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional tanpa dipengaruhi hawa nafsu maupun kepentingan pribadi (Al-Maududi, 1984, hlm. 85–90).

Allah Ta'ālā berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat ihsan..." (QS. An-Naḥl [16]: 90).

Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah menegakkan keadilan dalam seluruh urusan kehidupan, sedangkan kezaliman menjadi penyebab rusaknya masyarakat (Al-Ṭabarī, 2001a). Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman (Ibn Kathīr, 2004a). QS. An-Nisā' [4]: 135 juga memerintahkan setiap mukmin menegakkan keadilan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan keluarga atau kepentingan pribadi (M. ibn A. Al-Qurṭubī, 2006).

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ

"*Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya...*" (HR. Muslim No. 1827).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan orang yang berlaku adil dalam setiap amanahnya, sedangkan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan merupakan sebab tegaknya masyarakat dan terpeliharanya kemaslahatan umum (An-Nawawi, 1972, Jilid XII, hlm. 211–214; Ibnu Taimiyah, 1995, Jilid XXVIII, hlm. 63–65).

Analisis menunjukkan bahwa keadilan merupakan implementasi tauhid dan penegakan syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat terhindar dari kezaliman, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa keadilan merupakan pilar utama masyarakat Islami yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI melalui pembinaan akhlak, pendidikan, pelayanan sosial, dan dakwah yang menanamkan nilai keadilan sesuai Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Shalih.

G. Kepedulian Sosial sebagai Karakteristik Masyarakat Islami

Kepedulian sosial (*at-takāful al-ijtimā'ī*) merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat Islami yang mencerminkan kesempurnaan iman dan ukhuwah. Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang mukmin tidak hanya bertanggung jawab terhadap ibadah pribadi, tetapi juga berkewajiban mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kasih sayang, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial (Al-Qaradhawi, 1999, hlm. 145–150).

Allah Ta'ālā berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*" (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk saling membantu dalam segala bentuk kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan agama dan kehidupan, serta melarang kerja sama dalam dosa dan kerusakan (Ath-Thabari, 2001, Jilid VIII, hlm. 70–74). Demikian pula QS. Al-Baqarah [2]: 177 menegaskan bahwa kebajikan diwujudkan melalui kepedulian kepada kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kesempurnaan iman tercermin pada pemenuhan hak-hak sosial di samping akidah dan ibadah (Ibnu Katsir, 2004, Jilid I, hlm. 506–510).

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ

"*Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh.*" (HR. al-Bukhari No. 6011; Muslim No. 2586).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban saling membantu dan merasakan penderitaan sesama muslim sebagai konsekuensi ukhuwah dan keimanan (An-Nawawi, 1972, Jilid XVI, hlm. 139–142). Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pelayanan sosial merupakan bagian dari pengamalan syariat (Ibnu Taimiyah, 1995, Jilid XXVIII, hlm. 76–81).

Analisis menunjukkan bahwa kepedulian sosial merupakan implementasi nyata dari tauhid, ukhuwah, dan penegakan syariat. Kepedulian tersebut mencakup bantuan kepada kaum lemah, pendidikan, dakwah, serta partisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama sehingga masyarakat Islami dibangun di atas solidaritas dan tanggung jawab kolektif.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa kepedulian sosial menjadi penyempurna karakter masyarakat Islami yang lahir dari tauhid, ketaatan, penegakan syariat, ukhuwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan keadilan. Nilai ini melahirkan masyarakat yang saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menjadi dasar dalam menilai implementasi pembentukan

masyarakat Islami oleh HASMI melalui pendidikan, pelayanan sosial, pembinaan umat, dan dakwah sesuai Al-Qur'an, As-Sunnah, dan manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

3.2. IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAMI OLEH HASMI

A. Sekilas tentang HASMI

HASMI (Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami) merupakan organisasi dakwah Islam yang berdiri pada tahun 2005 di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Haluan Dasar HASMI, organisasi ini berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', berakidah Ahlussunnah wal Jama'ah, serta menegaskan diri sebagai ormas asli Indonesia yang tidak berafiliasi dengan organisasi lintas negara (HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017, hlm. 2). Kehadiran HASMI dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan gerakan dakwah yang memiliki manhaj yang jelas dalam membina masyarakat Islami. Dalam *Kebangkitan Sejati* ditegaskan bahwa kebangkitan umat harus diawali dengan pembinaan ruhani melalui dakwah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah guna mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia (HASMI, *Kebangkitan Sejati*, 2015, hlm. 26–27).

Sumber primer HASMI menunjukkan bahwa organisasi dipimpin oleh Dewan Pembina dengan Ketua Umum Dr. M. Sarbini, M.H.I. dan Ketua Harian M. Fatih Haidaril Iltizam, M.Pd.I., serta didukung berbagai bidang fungsional, seperti dakwah, tarbiyah, kaderisasi, humas, teknologi informasi, dan sosial kemasyarakatan untuk mengintegrasikan pelaksanaan dakwah dan pembinaan masyarakat Islami (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 3–6).

Berdasarkan *Profil HASMI*, organisasi ini memiliki legalitas sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum di Indonesia melalui pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri, serta pengakuan dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Legalitas tersebut menjadi dasar hukum bagi HASMI dalam melaksanakan kegiatan dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 1–2).

B. Visi, Misi dan Tujuan HASMI

Visi, misi, dan tujuan HASMI berorientasi pada terwujudnya masyarakat Islami di Indonesia yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Meskipun *Haluan Dasar HASMI* tidak mencantumkan visi dalam satu rumusan resmi, arah perjuangan organisasi menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami merupakan orientasi utama dakwahnya (HASMI, *Haluan Dasar HASMI*, 2017, hlm. 2–4). Dalam *Kebangkitan Sejati* dijelaskan bahwa tujuan tersebut diwujudkan melalui kebangkitan ruhani sehingga terbentuk masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam sebagai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah (HASMI, *Kebangkitan Sejati*, 2015, hlm. 26–27).

Untuk mencapai tujuan tersebut, HASMI menetapkan dakwah sebagai misi dan strategi utama karena dipandang sebagai manhaj para nabi dalam memperbaiki manusia melalui pembinaan iman, akidah, dan ruhani secara bertahap sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ. (HASMI, *Haluan Dasar HASMI*, 2017, hlm. 4–6; HASMI, *Kebangkitan Sejati*, 2015, hlm. 27–29).

C. Konsep HASMI tentang Masyarakat Islami

Menurut HASMI, masyarakat Islami adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam sebagai satu-satunya agama Allah. Masyarakat tersebut secara kolektif maupun individual bertekad meniti *ṣirāṭ al-mustaqīm*, didominasi oleh nilai-nilai istiqamah, kejujuran, kebersihan ruhani, dan kasih sayang, serta tunduk kepada syariat Allah dengan berupaya menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan (HASMI, *Menuju Masyarakat Islami*, 2019, hlm. 1–2). Konsep ini dipertegas dalam *Kebangkitan Sejati* yang menyatakan bahwa tujuan perjuangan HASMI adalah mewujudkan kebangkitan total melalui pembinaan ruhani yang bermuara pada berdirinya masyarakat Islami di Indonesia, yaitu masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam (HASMI, *Kebangkitan Sejati*, 2015, hlm. 26–27).

Oleh karena itu, masyarakat Islami menurut HASMI bukan sekadar masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tetapi masyarakat yang kehidupan sosialnya didominasi oleh nilai-nilai Islam (Masyarakat Muatan Islami) sebagai hasil dari proses dakwah, tarbiyah, dan penerapan syariat secara bertahap dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat (HASMI, Menuju Masyarakat Islami, 2019, hlm. 15–17; HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017, hlm. 5–7).

Berdasarkan konsep yang dikemukakan dalam sumber-sumber primer HASMI, masyarakat Islami dipahami sebagai hasil dari proses transformasi individu dan sosial yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. HASMI memandang bahwa pembentukan masyarakat Islami tidak cukup diukur dari identitas keagamaan mayoritas penduduk, tetapi dari dominannya nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, dakwah dan tarbiyah ditempatkan sebagai instrumen utama untuk membentuk pribadi yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan berkomitmen mengamalkan syariat, sehingga secara bertahap melahirkan lingkungan sosial yang berkarakter Islami (HASMI, Menuju Masyarakat Islami, 2019, hlm. 1–2, 15–17; HASMI, Kebangkitan Sejati, 2015, hlm. 26–27). Konsep ini menunjukkan bahwa pendekatan HASMI bersifat transformasional, yakni memulai perubahan dari pembinaan individu, kemudian keluarga, hingga masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa konsep masyarakat Islami menurut HASMI memiliki keselarasan dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terutama dalam menjadikan tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, penegakan syariat, serta dakwah sebagai fondasi perubahan masyarakat. Kekhasan HASMI terletak pada penekanan terhadap konsep Masyarakat Muatan Islami, yaitu masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai Islam melalui proses dakwah, tarbiyah, dan pembinaan ruhani secara bertahap, tanpa menjadikan pembentukan negara Islam sebagai fokus perjuangan organisasi. Dengan demikian, implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI merupakan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui strategi dakwah yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh (HASMI, *Haluan Dasar HASMI*, 2017, hlm. 5–7; HASMI, *Menuju Masyarakat Islami*, 2019, hlm. 15–17).

D. Strategi Dakwah HASMI dalam Mewujudkan Masyarakat Islami

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa HASMI memilih strategi dakwah (manhaj ad-da'wah) sebagai jalan utama dalam mewujudkan masyarakat Islami. Haluan Dasar HASMI menegaskan bahwa misi organisasi adalah mendakwahkan kaum muslimin melalui pembinaan iman, akidah, ilmu, dan akhlak berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Perubahan masyarakat dipandang harus diawali dari perubahan kualitas individu melalui dakwah, bukan melalui perebutan kekuasaan politik atau penggunaan kekerasan (HASMI, 2017).

Prinsip tersebut dipertegas dalam Kebangkitan Sejati yang menjelaskan bahwa dakwah merupakan manhaj para nabi dalam memperbaiki umat. HASMI mendasarkan strateginya pada prinsip bahwa perubahan masyarakat dimulai dari perubahan diri sebagaimana QS. Ar-Ra'd [13]: 11, serta meneladani metode Rasulullah ﷺ yang membangun masyarakat Madinah melalui pembinaan akidah secara bertahap (at-tadarruj) (DPP HASMI, 2016). Oleh karena itu, HASMI berorientasi pada pembentukan Masyarakat Muatan Islami, yaitu masyarakat yang nilai-nilai Islam mendominasi kehidupan sosial melalui kesadaran masyarakat, bukan melalui pembentukan negara Islam atau perebutan kekuasaan politik (HASMI, 2023a).

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, tarbiyah, kaderisasi, dan pelayanan masyarakat sebagai proses perubahan yang dimulai dari pembinaan individu menuju transformasi sosial. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pendekatan HASMI memiliki kesesuaian dengan metodologi dakwah para nabi yang menekankan

pembinaan tauhid, ilmu, dan akhlak sebelum perubahan sosial. Dengan demikian, strategi HASMI bersifat kultural-edukatif, yaitu membangun masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai Islam, bukan melalui perubahan struktur politik sebagai langkah awal.

E. Implementasi Pembinaan Tauhid sebagai Fondasi Masyarakat Islami

Pembentukan masyarakat Islami menurut HASMI diawali dengan pembinaan tauhid sebagai fondasi seluruh aktivitas dakwah. Dalam *Haluan Dasar HASMI* ditegaskan bahwa dakwah organisasi berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma', serta berorientasi pada pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai dasar terbentuknya masyarakat Islami (HASMI, 2017). Prinsip ini dipertegas dalam *Ruh Juang Masyarakat Islami* yang menyatakan bahwa perjuangan membangun masyarakat Islami merupakan konsekuensi dari kemurnian tauhid, sehingga perubahan masyarakat harus diawali dengan pemurnian akidah individu sebelum diarahkan kepada perubahan sosial (DPP HASMI, 2015).

Dalam buku *Dinul Islam*, dijelaskan bahwa tauhid adalah mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyyah, serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya, sehingga seorang muslim hanya beribadah, bergantung, dan menaati Allah semata tanpa mencampurkan sedikit pun unsur kesyirikan. Tauhid diposisikan sebagai inti seluruh risalah para nabi sekaligus dasar diterimanya seluruh amal ibadah. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat menurut HASMI harus dimulai dari pelurusan akidah sebelum pembinaan syariat, akhlak, maupun aspek sosial kemasyarakatan, karena perubahan masyarakat yang hakiki hanya dapat terwujud apabila individu-individunya memiliki akidah yang benar (HASMI, 2023a).

Implementasi pembinaan tauhid dilakukan melalui berbagai program dakwah, seperti kajian akidah, halaqah tarbiyah, dauroh ilmiah, penerbitan buku-buku tauhid, media dakwah, dan pendidikan Islam. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk pribadi muslim yang memahami tauhid rububiyah, uluhiyyah, dan asma' wa sifat sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah (HASMI, 2023b). HASMI memandang bahwa kemurnian tauhid akan melahirkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjadi dasar terbentuknya akhlak, ukhuwah, dan kepedulian sosial (Lajnah Ilmiah HASMI, 2014).

Dari hasil analisis terhadap implementasi pembinaan tauhid oleh HASMI menunjukkan kesesuaian dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Naḥl [16]: 36 dan QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56 yang menempatkan tauhid sebagai tujuan pengutusan para rasul dan tujuan penciptaan manusia. Strategi HASMI yang memprioritaskan pembinaan akidah sebelum aspek sosial juga sejalan dengan metode dakwah Rasulullah ﷺ pada periode Makkah, yaitu membangun keimanan sebagai fondasi perubahan masyarakat. Dengan demikian, pembinaan tauhid tidak hanya dipahami sebagai pendidikan akidah, tetapi sebagai proses transformasi nilai yang membentuk perilaku individu dan kehidupan sosial berdasarkan syariat.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembinaan tauhid merupakan fondasi utama dalam dakwah dan pendidikan Islam karena membentuk karakter muslim yang berorientasi pada penghambaan kepada Allah serta menjadi dasar perubahan sosial. Temuan ini mendukung implementasi HASMI yang menjadikan pembinaan akidah sebagai prioritas dalam membangun masyarakat Islami (Agusman & Samsuddin, 2024).

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi pembinaan tauhid oleh HASMI merupakan aktualisasi langsung terhadap konsep tauhid dalam Al-Qur'an. Melalui kajian akidah, tarbiyah, pendidikan, dan media dakwah, HASMI berupaya menanamkan tauhid sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga lahir masyarakat yang menjadikan Allah sebagai orientasi utama kehidupan. Implementasi ini memperlihatkan kesesuaian antara konsep normatif Al-Qur'an dengan strategi dakwah HASMI dalam membentuk masyarakat Islami secara bertahap.

F. Implementasi Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI dilanjutkan dengan penanaman ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai konsekuensi dari tauhid. HASMI memandang bahwa keimanan yang benar harus melahirkan sikap berserah diri kepada Allah, tunduk kepada syariat-Nya, serta mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Dinul Islam dijelaskan bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, menaati-Nya, serta berlepas diri dari kesyirikan sehingga keislaman harus diwujudkan dalam kepatuhan kepada seluruh ajaran Allah dan Rasul-Nya (HASMI, 2023a).

Prinsip tersebut menjadi landasan perjuangan HASMI sebagaimana ditegaskan dalam Haluan Dasar HASMI yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' serta menjadikan dakwah sebagai jalan utama mewujudkan masyarakat Islami. Dalam Kebangkitan Sejati dijelaskan bahwa dakwah mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah dan metode para nabi, yaitu membina iman, akidah, dan ruhani secara bertahap sebagai dasar perubahan masyarakat. HASMI juga menegaskan bahwa pendekatan dakwah lebih sesuai diterapkan di Indonesia daripada pendekatan kekerasan karena mengikuti metode Rasulullah ﷺ dalam membangun masyarakat Madinah (HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017, hlm. 2–7; HASMI, Kebangkitan Sejati, hlm. 26–31).

Implementasi ketaatan tersebut diwujudkan melalui kajian keislaman, tarbiyah, kaderisasi, pendidikan Islam, dakwah media, penerbitan buku, dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan. Program-program ini bertujuan membentuk pribadi muslim yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat (HASMI, Profil HASMI, 2023, hlm. 3–6). Dengan demikian, HASMI memandang perubahan masyarakat harus diawali dengan pembentukan individu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutriani dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan prinsip fundamental dalam pendidikan Islam untuk membentuk karakter spiritual dan moral, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai otoritas tertinggi dalam berpikir dan bertindak. Perspektif tersebut memperkuat implementasi HASMI yang mengintegrasikan pembinaan akidah, tarbiyah, kaderisasi, dan dakwah sebagai sarana menumbuhkan komitmen terhadap wahyu.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan kelanjutan dari pembinaan tauhid. Melalui pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan media Islam, HASMI membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Implementasi ini selaras dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an yang menempatkan wahyu sebagai otoritas tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan sesuai pemahaman Salafus Shalih.

G. Implementasi Penegakan Syariat Islam sebagai Pedoman Kehidupan

Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI diwujudkan melalui penegakan syariat Islam sebagai pedoman seluruh aspek kehidupan. HASMI memandang syariat sebagai konsekuensi dari tauhid dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya, sehingga pembinaan akidah harus diikuti dengan pengamalan syariat dalam bidang ibadah, akhlak, keluarga, muamalah, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam Dienul Islam dijelaskan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan (nizām al-ḥayāh) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam berdasarkan wahyu Allah (HASMI, Dienul Islam, Bab III: Islam; Bab IV: Tauhid).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Haluan Dasar HASMI yang menjelaskan bahwa tujuan organisasi adalah mewujudkan Masyarakat Muatan Islami, yaitu masyarakat yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup atas dasar kesadaran dan ketakwaan, bukan melalui pendekatan politik atau pemaksaan kekuasaan (HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017, hlm. 5–7). Konsep ini diperkuat dalam Menuju Masyarakat Islami yang menggambarkan masyarakat Islami sebagai masyarakat yang kehidupannya dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an

dan As-Sunnah, ditandai dengan kejujuran, istiqamah, kasih sayang, serta komitmen mengamalkan syariat dalam kehidupan individu maupun sosial (HASMI, Menuju Masyarakat Islami, 2019, hlm. 1–17).

Implementasi nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai program dakwah, pendidikan, kaderisasi, pembinaan keluarga, penerbitan buku, dakwah digital, dan pelayanan sosial. Program-program ini menunjukkan bahwa penegakan syariat dipahami sebagai proses edukatif dan bertahap melalui pembinaan umat sehingga lahir kesadaran kolektif untuk mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan (HASMI, Profil HASMI, 2023, hlm. 3–6). Dengan demikian, HASMI memandang penegakan syariat bukan semata-mata sebagai penerapan hukum formal, tetapi sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution (2022) yang menyimpulkan bahwa implementasi syariat akan lebih efektif apabila didahului oleh proses dakwah dan pendidikan yang berkesinambungan sehingga pengamalannya lahir dari kesadaran iman, bukan karena tekanan eksternal.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa penegakan syariat merupakan implementasi praktis dari tauhid dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Melalui dakwah, pendidikan, kaderisasi, pembinaan keluarga, dan pelayanan masyarakat, HASMI berupaya membangun Masyarakat Muatan Islami, yaitu masyarakat yang secara sadar menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

H. Implementasi Ukhuwah Islamiyah sebagai Pilar Persatuan Masyarakat Islami

Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI diwujudkan melalui penguatan ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi persatuan umat. Dalam Bab Persatuan Haluan Dasar HASMI ditegaskan bahwa persatuan kaum muslimin merupakan prinsip penting perjuangan organisasi yang harus dibangun di atas Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan atas dasar fanatisme golongan, suku, ataupun kepentingan duniawi. HASMI memandang bahwa persatuan merupakan kebutuhan strategis dalam menguatkan dakwah dan membangun masyarakat Islami, sehingga seluruh anggota diarahkan untuk menjaga persaudaraan, menghindari perpecahan, serta bekerja sama dalam menegakkan agama Allah (HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017, Bab Persatuan, hlm. 9).

Prinsip tersebut diimplementasikan melalui berbagai aktivitas pembinaan yang memperkuat hubungan antarsesama muslim, seperti halaqah tarbiyah, kajian rutin, dauroh ilmiah, kaderisasi, pelayanan sosial, dan koordinasi dakwah dalam struktur organisasi. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman keislaman, tetapi juga membentuk budaya saling menasihati, saling membantu, dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah dipahami sebagai hasil pembinaan akidah yang melahirkan solidaritas sosial sekaligus memperkuat efektivitas dakwah (HASMI, Profil HASMI, 2023, hlm. 3–6).

Konsep tersebut diperkuat dalam Menuju Masyarakat Islami yang menjelaskan bahwa masyarakat Islami merupakan masyarakat yang dinaungi oleh norma-norma Islam, ditandai dengan kasih sayang, kejujuran, istiqamah, dan semangat saling menolong sebagai konsekuensi dari keimanan. Oleh karena itu, persatuan umat menurut HASMI tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang harus tercermin dalam kehidupan individu maupun sosial (HASMI, Menuju Masyarakat Islami, 2019, hlm. 1–17). Kebangkitan Sejati juga menegaskan bahwa kebangkitan umat memerlukan perjuangan kolektif melalui dakwah yang menyatukan kaum muslimin di atas manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah sehingga pembentukan masyarakat Islami tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan melalui kerja sama yang terorganisasi (HASMI, Kebangkitan Sejati, 2015, hlm. 26–31).

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber primer HASMI, implementasi ukhuwah Islamiyah tidak dimaknai sebatas hubungan emosional antarsesama muslim, tetapi sebagai strategi kelembagaan dalam membangun kekuatan dakwah. Persatuan diwujudkan melalui integrasi pembinaan akidah, tarbiyah, kaderisasi, serta aktivitas sosial sehingga terbentuk jaringan dakwah yang kokoh dan mampu memperluas penyebaran nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ukhuwah menjadi modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kohesi internal organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan masyarakat menuju terwujudnya Masyarakat Muatan Islami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fauzan (2019) yang menyatakan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan modal sosial yang berperan penting dalam membangun solidaritas, kerja sama, dan stabilitas masyarakat melalui pendidikan, majelis ilmu, serta aktivitas dakwah. Penguatan ukhuwah tidak hanya mempererat hubungan antarindividu, tetapi juga meningkatkan kapasitas kolektif umat dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi ukhuwah Islamiyah oleh HASMI merupakan perwujudan prinsip persatuan yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah. Melalui pembinaan akidah, tarbiyah, kaderisasi, pelayanan sosial, dan penguatan struktur dakwah, HASMI mengintegrasikan persaudaraan Islam ke dalam proses pembentukan masyarakat Islami. Dengan demikian, ukhuwah tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang memperkuat dakwah, menjaga persatuan umat, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial secara berkelanjutan.

I. Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Instrumen Pembentukan Masyarakat Islami

Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI diwujudkan melalui pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagai inti gerakan dakwah. HASMI memandang dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran Islam, tetapi proses sistematis mengajak masyarakat kepada tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memperbaiki penyimpangan akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Hal ini ditegaskan dalam *Haluan Dasar HASMI* yang menyatakan bahwa misi utama organisasi adalah mendakwahkan kaum muslimin untuk mewujudkan masyarakat Islami melalui pembinaan yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' (HASMI, *Haluan Dasar HASMI*, 2017, hlm. 2–6).

Dalam *Kebangkitan Sejati* dan *Da'watuna* dijelaskan bahwa dakwah merupakan manhaj para nabi yang dimulai dengan pembinaan iman, akidah, dan ruhani. Dakwah harus dilakukan dengan ilmu, hikmah, dan kesabaran sehingga mampu membentuk individu, keluarga, dan masyarakat yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar dipahami sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (HASMI, *Kebangkitan Sejati*, 2015, hlm. 26–31; HASMI, *Da'watuna*, hlm. 18).

Implementasi nilai tersebut diwujudkan melalui kajian rutin, dauroh ilmiah, halaqah tarbiyah, kaderisasi, dakwah digital, penerbitan buku, serta pelayanan sosial. Keberadaan bidang Dakwah Online, Ta'lim dan Tarbiyah, Kaderisasi, serta Sosial dan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar dijalankan secara terstruktur melalui pembinaan akidah, pendidikan, dan pelayanan masyarakat (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 3–6). Dengan demikian, HASMI memandang dakwah sebagai sarana utama membangun budaya masyarakat yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian A. Karim Syeikh (2018) yang menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus diawali dengan dakwah yang persuasif melalui hikmah, pendidikan, dan pembinaan, bukan sekadar tindakan represif. Penelitian Wardana, Paralian, dan Yuzaidi (2023) juga menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip etis

yang membangun masyarakat melalui pendidikan, keteladanan, dan pembinaan berkelanjutan. Perspektif tersebut memperkuat implementasi HASMI yang mengintegrasikan dakwah, tarbiyah, kaderisasi, media dakwah, dan pelayanan sosial sebagai satu kesatuan dalam membangun masyarakat Islami.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi amar ma'ruf nahi munkar merupakan perwujudan misi dakwah HASMI dalam membentuk masyarakat Islami. Melalui pendidikan, kaderisasi, media dakwah, dan pelayanan sosial, HASMI mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah secara bertahap sehingga amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga strategi kelembagaan untuk membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, dan menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

J. Implementasi Keadilan sebagai Pilar Masyarakat Islami

Implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI diwujudkan melalui penegakan nilai keadilan sebagai bagian dari pengamalan syariat Islam. HASMI memandang keadilan sebagai konsekuensi dari tauhid dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya, sehingga seluruh aspek kehidupan harus berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan hawa nafsu atau kepentingan kelompok. Dalam *Dienul Islam* dijelaskan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama berdasarkan wahyu, sehingga penerapan syariat melahirkan kehidupan yang adil dan tertib (HASMI, *Dienul Islam*, Bab III: *Islam*).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam *Haluan Dasar HASMI* dan *Menuju Masyarakat Islami* yang menjelaskan bahwa masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, istiqamah, dan kepatuhan kepada syariat. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan akhlak, pendidikan, dan dakwah yang membentuk karakter masyarakat sesuai tuntunan Islam (HASMI, *Haluan Dasar HASMI*, 2017, hlm. 2–7; HASMI, *Menuju Masyarakat Islami*, 2019, hlm. 1–17).

Implementasi nilai keadilan dilakukan melalui program pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan pelayanan sosial yang menanamkan sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak orang lain. HASMI juga berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi, sehingga dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 3–6). Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai hasil internalisasi tauhid dan pengamalan syariat yang tercermin dalam akhlak, kepemimpinan, dan kehidupan sosial.

Temuan ini didukung oleh penelitian Harahap (2024) yang menyimpulkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan amanah, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama. Perspektif tersebut memperkuat implementasi HASMI dalam membangun budaya keadilan melalui pendidikan, pembinaan akhlak, dan dakwah.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi keadilan oleh HASMI memiliki kesesuaian dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an yang menjadikan keadilan sebagai prinsip utama kehidupan. Melalui pembinaan akidah, pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan pelayanan sosial, HASMI berupaya membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi amanah, kejujuran, dan pemenuhan hak sesuai syariat Islam. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai manifestasi ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh aspek kehidupan sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

K. Implementasi Kepedulian Sosial sebagai Wujud Masyarakat Islami

Pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI tidak hanya berfokus pada pembinaan akidah, pengamalan syariat, dan penguatan ukhuwah, tetapi juga diwujudkan melalui pengembangan kepedulian sosial sebagai bagian dari misi dakwah. Implementasinya terlihat pada berbagai program Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), santunan bagi fakir miskin, dhuafa, dan anak yatim, bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pembinaan keluarga, pendidikan Islam, serta kegiatan bakti sosial. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial menjadi bagian integral dari strategi dakwah HASMI untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 12).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lizamah dan Ulfah (2022) yang menyimpulkan bahwa kepedulian sosial merupakan indikator keimanan yang diwujudkan melalui perhatian kepada anak yatim, fakir miskin, dan kelompok yang membutuhkan. Penelitian Achfandhy, Amiliya, dan Sajidah (2022) juga menunjukkan bahwa dakwah yang dipadukan dengan pelayanan sosial mampu memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat. Temuan tersebut memperkuat implementasi HASMI yang mengintegrasikan dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan sosial sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat Islami.

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kepedulian sosial oleh HASMI merupakan wujud pengamalan tauhid, syariat, dan ukhuwah Islamiyah melalui dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Berbagai program pelayanan sosial, seperti penyaluran ZIS, bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan keluarga, menunjukkan bahwa HASMI mengintegrasikan dakwah dengan tanggung jawab sosial dalam proses pembentukan masyarakat Islami. Pendekatan ini sejalan dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an yang menempatkan kepedulian sosial sebagai manifestasi keimanan. Dengan demikian, pelayanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan filantropi, tetapi juga sebagai instrumen dakwah untuk memperkuat solidaritas, menghadirkan kemaslahatan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah menuju terwujudnya Masyarakat Muatan Islami.

L. Implementasi Konsep Masyarakat Islami dalam Perspektif HASMI

Data wawancara dengan Ustadz Supendi, S.Sy., selaku Kepala Bidang Kaderisasi HASMI, menunjukkan bahwa orientasi perjuangan HASMI bukanlah pembentukan negara Islam sebagai tujuan langsung, melainkan pembentukan masyarakat bermuatan Islami melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat. Menurut beliau, masyarakat Islami adalah masyarakat yang kehidupan sosialnya didominasi oleh nilai-nilai Islam sehingga warganya memiliki keimanan yang benar, akhlak yang mulia, serta komitmen untuk mengamalkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, HASMI memandang bahwa perubahan masyarakat harus diawali dengan perubahan kualitas individu melalui pembinaan akidah dan ilmu sebelum mengharapkan lahirnya perubahan sosial yang lebih luas (Wawancara dengan Ustadz Supendi, S.Sy., Kepala Bidang Kaderisasi HASMI, 2026).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa HASMI membedakan secara konseptual antara pembentukan masyarakat Islami dan pembentukan negara Islam. Prioritas organisasi diarahkan pada transformasi masyarakat melalui dakwah sehingga perubahan sosial dipahami sebagai hasil dari perubahan kualitas manusia.

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI mengikuti prinsip perubahan sosial dalam Al-Qur'an, yaitu membangun masyarakat melalui pembinaan manusia sebelum perubahan struktur sosial.

M. Implementasi Penguatan Struktur Organisasi sebagai Instrumen Dakwah

Data empiris hasil wawancara dengan Ustadz Anas Abdillah, S.Ud., Kepala Bidang Struktural HASMI, menunjukkan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan bagian

penting dari strategi dakwah HASMI dalam mewujudkan masyarakat Islami. HASMI terus mengembangkan struktur organisasi di berbagai wilayah Indonesia agar dakwah Ahlussunnah wal Jama'ah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Seluruh unsur organisasi, mulai dari pengurus, anggota, hingga simpatisan, diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan misi dakwah sehingga pembinaan umat dapat berlangsung secara berkesinambungan (Wawancara dengan Ustadz Anas Abdillah, S.Ud., Kepala Bidang Struktural HASMI, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa HASMI memandang struktur organisasi bukan sekadar perangkat administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dakwah yang mendukung pembinaan akidah, pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan masyarakat. Penguatan jaringan organisasi memungkinkan koordinasi program dakwah berjalan lebih efektif serta memperluas implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah di berbagai daerah.

Hasil wawancara ini sejalan dengan **Profil HASMI** yang menunjukkan adanya bidang-bidang fungsional, seperti Ta'lim dan Tarbiyah, Kaderisasi, Dakwah Online, Humas, Teknologi Informasi, dan Sosial Kemasyarakatan sebagai pendukung efektivitas dakwah (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 3–6).

Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan implementasi strategis dakwah HASMI dalam membentuk masyarakat Islami. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan perubahan melalui kekuasaan politik, HASMI mengembangkan transformasi masyarakat melalui jaringan dakwah yang terorganisasi, kaderisasi yang berkelanjutan, dan pembinaan umat secara sistematis sehingga struktur organisasi berfungsi sebagai media transformasi sosial berbasis dakwah menuju terwujudnya masyarakat Islami.

N. Implementasi Dakwah Digital sebagai Strategi Pembentukan Masyarakat Islami

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan masyarakat digital (*digital society*) sehingga strategi dakwah perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Yusuf Supriyadi, S.Pd.I., Lc., M.A., selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi HASMI, diperoleh informasi bahwa HASMI memandang pengguna internet sebagai sasaran utama dakwah, khususnya generasi milenial, Generasi Z, dan Generasi Alpha yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung di ruang digital. Oleh karena itu, HASMI menjadikan dakwah digital sebagai strategi penting dalam mewujudkan masyarakat Islami melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal (Wawancara dengan Ustadz Yusuf Supriyadi, S.Pd.I., Lc., M.A., 2026).

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dakwah berbasis digital, seperti Bimbingan Intensif Studi Islam Online (BISI Online), Kuliah Studi Islam (KSI Online), kajian *live streaming*, video edukasi dan bantahan terhadap berbagai syubhat, Majalah Online Intisari HASMI, siaran khutbah Jumat, serta program Kencleng Jumat Online. Berbagai program ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dimanfaatkan sebagai media pendidikan, pembinaan akidah, dakwah, dan pemberdayaan umat sehingga proses pembinaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkesinambungan (Wawancara dengan Ustadz Yusuf Supriyadi, S.Pd.I., Lc., M.A., 2026).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan bentuk adaptasi strategi dakwah HASMI terhadap perubahan masyarakat kontemporer. Dakwah tidak lagi terbatas pada masjid, majelis taklim, atau lembaga pendidikan, tetapi diperluas melalui media sosial, aplikasi digital, dan platform pembelajaran daring. Temuan ini juga memperkuat Profil HASMI yang menempatkan Bidang Teknologi Informasi sebagai salah satu unsur strategis dalam mendukung pelaksanaan dakwah melalui berbagai media digital (HASMI, *Profil HASMI*, 2023, hlm. 3–6).

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah digital merupakan pengembangan strategis dari model dakwah HASMI. Jika pembinaan kader menjadi fondasi dan penguatan struktur organisasi memperluas jaringan dakwah, maka pemanfaatan teknologi

informasi memungkinkan dakwah menjangkau masyarakat digital secara lebih efektif. Dengan demikian, implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI berkembang menjadi model transformasi masyarakat berbasis dakwah digital (*digital da'wah-based social transformation*), yaitu proses pembinaan masyarakat yang mengintegrasikan dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan umat melalui teknologi informasi tanpa mengurangi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Model ini menunjukkan bahwa metode dakwah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sementara substansi ajaran Islam tetap menjadi landasan utama pembentukan masyarakat Islami.

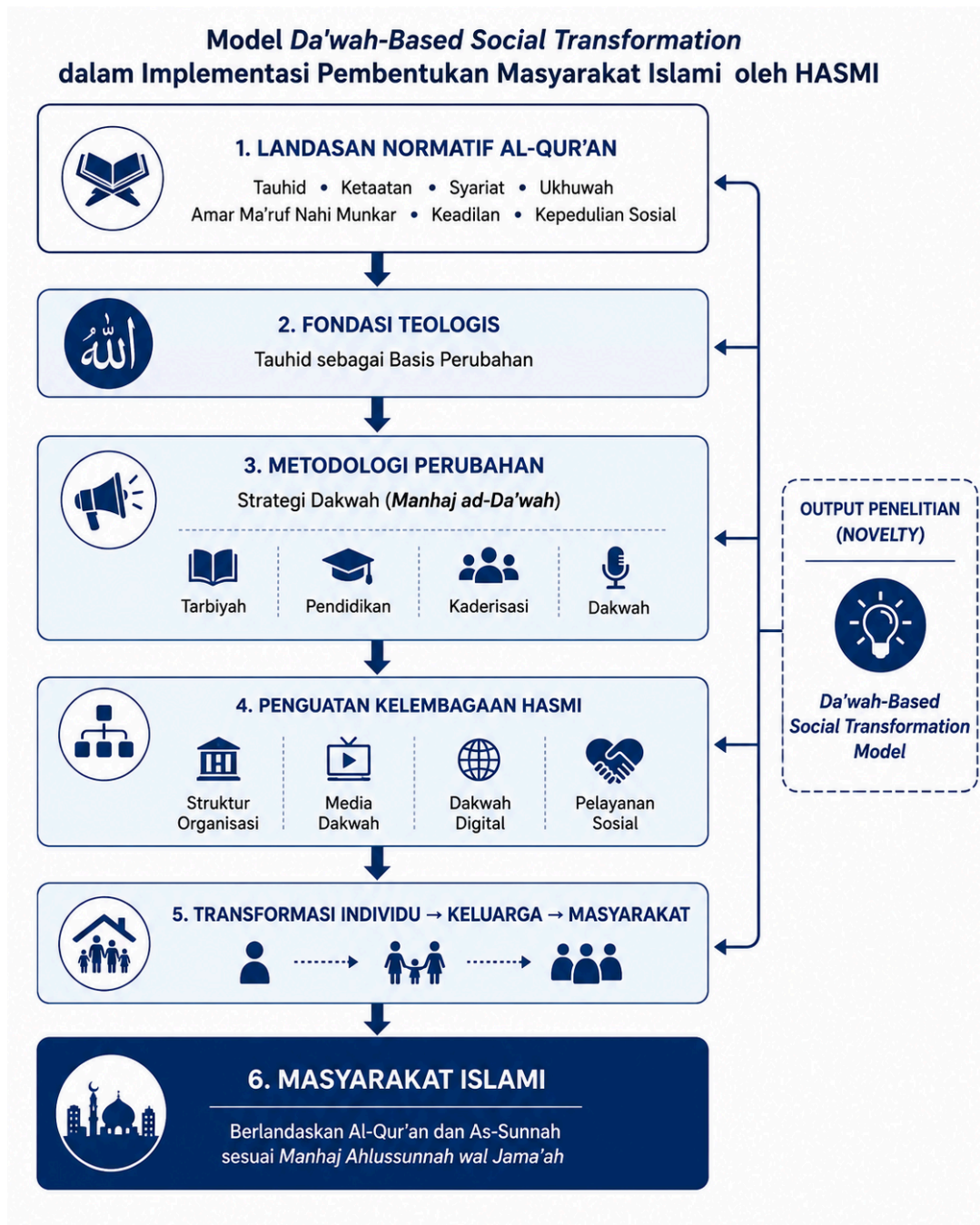
3.3. ANALISIS INTEGRATIF IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAMI OLEH HASMI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an. Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis sahih, kitab tafsir, dokumen primer HASMI, dan data wawancara menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami dipahami sebagai proses transformasi bertahap melalui pembinaan individu, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut dibangun di atas tujuh karakteristik utama, yaitu tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, penegakan syariat, ukhuwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, dan kepedulian sosial. Ketujuh karakteristik ini diimplementasikan melalui pendidikan Islam, tarbiyah, kaderisasi, dakwah media, pelayanan sosial, penguatan organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga konsep masyarakat Islami diterjemahkan ke dalam program dakwah yang sistematis (HASMI, Haluan Dasar HASMI, 2017; HASMI, Menuju Masyarakat Islami, 2019).

Penelitian ini juga menemukan bahwa HASMI membedakan dirinya dari sebagian gerakan Islam yang menempuh jalur politik kekuasaan atau kekerasan. Berdasarkan dokumen organisasi dan hasil wawancara, HASMI memfokuskan perjuangannya pada pembentukan Masyarakat Muatan Islami melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, HASMI memandang NKRI sebagai realitas yang harus dijaga stabilitasnya serta menolak terorisme dan segala bentuk kekerasan, karena perubahan masyarakat diyakini harus ditempuh melalui dakwah yang damai, edukatif, dan bertahap.

Jika dibandingkan dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an, implementasi HASMI menunjukkan koherensi yang kuat. Tauhid menjadi pondasi dakwah, ketaatan diwujudkan melalui pembinaan akidah dan ittibā' kepada sunnah, syariat diimplementasikan melalui pendidikan, ukhuwah diperkuat melalui kaderisasi dan jaringan organisasi, amar ma'ruf nahi munkar diwujudkan melalui dakwah dan edukasi, sedangkan keadilan serta kepedulian sosial direalisasikan melalui pelayanan masyarakat. Implementasi tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara konsep normatif Al-Qur'an dengan praktik dakwah HASMI.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disintesis bahwa implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI membentuk suatu model transformasi masyarakat berbasis dakwah (*da'wah-based social transformation*). Model ini dibangun atas empat unsur utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) tauhid sebagai fondasi teologis; (2) dakwah sebagai metodologi perubahan melalui pendidikan, tarbiyah, dan kaderisasi; (3) penguatan kelembagaan melalui struktur organisasi dan transformasi digital; serta (4) aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui ukhuwah, amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, dan kepedulian sosial.



**Gambar 1. Model Da'wah-Based Social Transformation dalam Implementasi
Pembentukan Masyarakat Islami oleh HASMI**

Gambar 1 diatas memperlihatkan bahwa proses pembentukan masyarakat Islami menurut HASMI berlangsung secara bertahap. Landasan normatif Al-Qur'an melahirkan pondasi tauhid yang kemudian diimplementasikan melalui strategi dakwah sebagai metodologi perubahan. Strategi tersebut diaktualisasikan melalui penguatan kelembagaan organisasi, meliputi kaderisasi, pendidikan, media dakwah, dakwah digital, dan pelayanan sosial sehingga menghasilkan transformasi individu, keluarga, hingga masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami tidak ditempuh melalui pendekatan politik kekuasaan ataupun kekerasan, melainkan melalui transformasi sosial yang bersifat edukatif, damai, dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, model *da'wah-based social transformation* merupakan sintesis konseptual dari keseluruhan temuan penelitian ini sekaligus menjadi kontribusi (novelty) terhadap pengembangan studi tafsir tematik, ilmu dakwah, dan transformasi sosial Islam di Indonesia.

Model tersebut menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami menurut HASMI tidak ditempuh melalui pendekatan politik kekuasaan ataupun cara-cara kekerasan. Model ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi tafsir tematik, ilmu dakwah, dan kajian transformasi sosial Islam di Indonesia. Temuan ini menjadi **novelty** penelitian karena menawarkan model dakwah integratif yang menghubungkan konsep normatif masyarakat Islami dalam Al-Qur'an dengan implementasi kelembagaan HASMI dalam konteks Indonesia kontemporer.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an merupakan suatu tatanan kehidupan yang dibangun di atas tujuh karakteristik utama, yaitu tauhid sebagai fondasi kehidupan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, penegakan syariat, ukhuwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, keadilan, dan kepedulian sosial. Ketujuh karakteristik tersebut saling berkaitan sebagai satu kesatuan sistem yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber nilai, pedoman hidup, dan dasar pembentukan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Islami dalam Al-Qur'an bukan sekadar identitas keagamaan, tetapi merupakan model kehidupan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketaqwaan melalui internalisasi nilai-nilai wahyu dalam seluruh aspek kehidupan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI) memiliki koherensi yang kuat dengan konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an. Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen primer HASMI dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kaderisasi, Kepala Bidang Struktural, dan Kepala Bidang Teknologi Informasi, ditemukan bahwa seluruh aktivitas organisasi diarahkan untuk membentuk Masyarakat Muatan Islami, yaitu masyarakat yang kehidupan sosialnya didominasi oleh nilai-nilai Islam melalui pembinaan tauhid, pendidikan, tarbiyah, kaderisasi, dakwah media, penguatan struktur organisasi, pelayanan sosial, serta pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi tersebut memperlihatkan bahwa konsep masyarakat Islami diterjemahkan ke dalam program-program dakwah yang bersifat sistematis, edukatif, dan berkelanjutan.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa strategi dakwah menjadi variabel integratif yang menghubungkan seluruh implementasi pembentukan masyarakat Islami oleh HASMI. Berbeda dengan pendekatan yang menjadikan perubahan politik atau penggunaan kekerasan sebagai titik awal transformasi sosial, HASMI memilih dakwah sebagai strategi utama yang mengikuti manhaj para nabi dan Rasulullah ﷺ. Melalui pembinaan individu, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan media digital, HASMI berupaya mewujudkan perubahan masyarakat secara bertahap (*at-tadarruj*), damai, dan berorientasi pada pembentukan kesadaran keagamaan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa HASMI memandang dakwah, komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penolakan terhadap terorisme sebagai satu kesatuan paradigma perjuangan yang bertujuan menjaga kemaslahatan, persatuan, dan stabilitas masyarakat dalam proses pembentukan masyarakat Islami.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang dapat disebut sebagai model transformasi masyarakat berbasis dakwah (*da'wah-based social transformation*), yaitu model pembentukan masyarakat Islami yang berlandaskan tauhid, diimplementasikan melalui dakwah, diperkuat oleh kaderisasi dan kelembagaan, serta dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Model tersebut menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami menurut HASMI merupakan proses transformasi yang dimulai

dari perubahan individu, berkembang menjadi perubahan keluarga dan komunitas, hingga bermuara pada terbentuknya masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Model ini menjadi kontribusi ilmiah penelitian dalam pengembangan studi tafsir tematik, ilmu dakwah, dan kajian transformasi sosial Islam di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi pengembangan ilmu tafsir dan studi Al-Qur'an, penelitian mengenai masyarakat Islami perlu terus dikembangkan melalui pendekatan tafsir maudhu'i yang dipadukan dengan perspektif ilmu-ilmu sosial dan studi dakwah. Integrasi tersebut diperlukan agar konsep-konsep normatif Al-Qur'an dapat dianalisis secara lebih kontekstual serta memiliki relevansi terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Kedua, bagi organisasi dakwah Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Islami memerlukan proses pembinaan yang berkesinambungan melalui dakwah, pendidikan, kaderisasi, pelayanan sosial, dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga dakwah diharapkan terus mengembangkan model pembinaan yang sistematis, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga mampu menjawab tantangan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Ketiga, bagi HASMI, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan terhadap implementasi program-program dakwah yang telah berjalan. Pengembangan kualitas kader, perluasan jaringan struktur organisasi, optimalisasi dakwah digital, peningkatan program pelayanan sosial, serta penguatan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat perlu terus dilakukan agar tujuan mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada studi kasus terhadap HASMI dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan wawancara. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan implementasi pembentukan masyarakat Islami pada berbagai organisasi dakwah di Indonesia, atau menggunakan pendekatan evaluatif dan kuantitatif untuk mengukur efektivitas program dakwah, kaderisasi, dan transformasi digital dalam membentuk masyarakat Islami.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model integratif pembentukan masyarakat Islami berbasis dakwah yang mensinergikan empat dimensi utama, yaitu: (1) konsep masyarakat Islami dalam Al-Qur'an sebagai landasan normatif, (2) manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai landasan metodologis, (3) strategi dakwah sebagai instrumen transformasi sosial, dan (4) implementasi kelembagaan HASMI melalui kaderisasi, penguatan struktur organisasi, pelayanan sosial, serta dakwah digital. Model ini menunjukkan bahwa transformasi masyarakat Islami berlangsung melalui proses yang bertahap, damai, edukatif, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan studi tafsir, ilmu dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Islam di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār Ṭawq Al-Najāh*. <https://shamela.ws/book/1681>
- Al-Farmawī, A. H. (1977). *Al-Bidāyah fī al-tafsīr al-mawḍūʿī: Dirāsah manhajīyyah mawḍūʿīyyah. Al-Haḍārah Al-ʿArabīyyah*.
- Al-Ḥajjāj, M. ibn. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Ṭayyibah*. <https://shamela.ws/book/1727>
- Al-Ḥākim al-Naysābūrī. (1990). *Al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn. Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, 1–4*. <https://shamela.ws/book/2266%0Ahttps://archive.org/details/waq2266>
- Al-Ḥanafī. (1998). *Sharḥ al-ʿAqīdah al-Ṭahāwīyyah. Muʿassasah Al-Risālah*. <https://shamela.ws/book/11118>
- Al-Maududi. (1984). *Islamic law and constitution (K. Ahmad, Ed. & Rev.). Islamic Publications*. <https://catalog.hathitrust.org/Record/000216142%0Ahttps://archive.org/details/islamiclawconsti0000maud>
- Al-Nawawī. (1972a). *Al-Minhāj fī sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī, 1–18*. <https://shamela.ws/book/1711>
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1972b). *Al-Minhāj fī sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj (Vols. 1–18). Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī*. <https://shamela.ws/book/1711>
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1972c). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī*. <https://shamela.ws/book/1711>
- Al-Qurṭubī, M. A. A. (2006). *Al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān. Muʿassasat Al-Risālah, 1–24*. https://shamela.ws/book/20855%0Ahttps://sites.dlib.nyu.edu/viewer/books/columbia_a_co001653/display
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān. Muʿassasah Al-Risālah*. <https://shamela.ws/book/20855>
- Al-Saʿdī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir. (2000). *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Muʿassasah Al-Risālah*. <https://shamela.ws/book/9622>
- Al-Shāṭibī, I. M. (1997a). *Al-Iʿtiṣām (Vols. 1–2). Dār Ibn ʿAffān*.
- Al-Shāṭibī, I. M. (1997b). *Al-Iʿtiṣām. Dār Ibn ʿAffān, 1–2*. <https://shamela.ws/book/11095%0Ahttps://archive.org/details/waq11095>
- Al-Shāṭibī, I. M. (1997c). *Al-Iʿtiṣām (Vols. 1–2). Dār Ibn ʿAffān*. <https://shamela.ws/book/11095>
- Al-Shāṭibī, I. M. (1997d). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah. Dār Ibn ʿAffān, 1–4*.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001a). *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān. Muʿassasah Al-Risālah*. <https://shamela.ws/book/7798>
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001b). *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān. Muʿassasat Al-Risālah, 1–26*. <https://shamela.ws/book/7798%0Ahttps://archive.org/details/waq7798>
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001c). *Jāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān (Vols. 1–26). Muʿassasat Al-Risālah*.
- Al-ʿIzz, I. A. (1998). *Sharḥ al-ʿAqīdah al-Ṭahāwīyyah. Muʿassasat Al-Risālah*. <https://shamela.ws/book/10646%0Ahttps://archive.org/details/waq10646>
- Anas, M. ibn. (1985). *Al-Muwaṭṭaʾ (M. F. ʿAbd al-Bāqī, Ed.). Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī*. <https://shamela.ws/book/2815%0Ahttps://archive.org/details/muwattaimammalik>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018a). (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications*. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018b). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications*. <https://us.sagepub.com/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Sage Publications*.

- <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- DPP HASMI. (2015). RUH JUANG MASYARAKAT ISLAMI.
- DPP HASMI. (2016). Kebangkitan Sejati. <https://t.me/ebookHASMI>
- DPP HASMI. (2017). Haluan Dasar HASMI. 1–12.
- Eko Nursalim, Z. dan K. (2021). Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Unsi). 10(1911101086), 256.
- Hardianto, A., & Fata, B. S. (2025). MAQASHID AL-QURAN DAN MAQASHID SYARIAH SEBAGAI BASIS PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. Tarbawi, 8. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- HASMI. (2017). HALUAN DASAR HASMI. <https://www.hasmi.org/e-book-haluan-dasar-hasmi-free-download/>
- HASMI. (2023a). DINUL ISLAM.
- HASMI. (2023b). Profil HASMI. Marwah Indo Media. <https://www.hasmi.org/wp-content/uploads/2021/01/Profil.pdf>
- Ibn Hajar al-ʿAsqalānī. (2001). Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār Al-Maʿrifah. <https://shamela.ws/book/1673>
- Ibn Kathīr. (2004a). Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm. Dār Ṭayyibah.
- Ibn Kathīr, I. ibn ʿUmar. (2004b). Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm. Dār Ṭayyibah, 1–8. <https://shamela.ws/book/23635%0Ahttps://archive.org/details/FP153272>
- Ibn Kathīr, I. ibn ʿUmar. (2004c). Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm (Vols. 1–8). Dār Ṭayyibah.
- Ibn Taymiyyah. (1995). Majmūʿ al-Fatāwā. Mujaḥḥad Al-Malik Fahd Li-Ṭibāʿat Al-Muṣṣaḥaf Al-Sharīf, 1–37.
- Ibn Taymiyyah. (1998). Al-Siyāsah al-sharʿiyyah fī iṣlāḥ al-rāʾī wa al-raʾiyyah. Dār Ibn Ḥazm.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn ʿAbd al-Ḥalīm. (1995). Majmūʿ al-fatāwā. Mujaḥḥad Al-Malik Fahd Li-Ṭibāʿat Al-Muṣṣaḥaf Al-Sharīf, 1–37.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn ʿAbd al-Ḥalīm. (1995). Majmūʿ al-fatāwā. Mujaḥḥad Al-Malik Fahd Li-Ṭibāʿat Al-Muṣṣaḥaf Al-Sharīf, 1–37. <https://shamela.ws/book/7289%0Ahttps://archive.org/details/FP7289>
- Ilaihi, M. & W. (2006). Manajemen Dakwah. Penerbit Kencana. https://prenadamedia.com?utm_source=chatgpt.com
- Lajnah Ilmiah HASMI. (2014). DAʾWATUNA. <https://t.me/ebookHASMI>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/naturalistic-inquiry/book842>
- M. Dawam Rahardjo. (1996). Ensiklopedi al-Qurʿān: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. https://books.google.com/books/about/Ensiklopedi_al_Qur_an.html?hl=id&id=6vHjAAAAMAAJ&utm_source=chatgpt.com
- Mahendra, E. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 25(1), 18–35.
- Miftahussurur, W., Aisyah, S., Islam, G. P., & Siyasah, F. (2025). ARSITEKTUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ALA MAQASID SYARIAH. HALAQOH: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2(2), 251–267. <https://jurnal.stikkendal.ac.id/index.php/halaqah/index>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Moh. Ali Aziz. (2017). Ilmu Dakwah. Penerbit Kencana, 350. https://prenadamedia.com?utm_source=chatgpt.com
- Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb. (2004). Kitāb al-Tawḥīd. Dār Al-Salām. <https://shamela.ws/book/10559>
- Muhlis, A., & Hannan, A. (2023). Contestation of Religious Discourse Among Muslim Dawah Activists in Contemporary Indonesia. Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies, 7(1),

56. <https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6326>
- Mujiono, M. Z. H. (2023). Dimensi Sosial Dalam Al-Qur'an. *Fassara: Jurnal Kajian Al-Qur'an, Tafsir Dan Qiraat*, 1(1), 70–92.
- Munir, M., & Jamal, M. Y. S. (2023). Analisis internalisasi nilai-nilai keislaman melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. In *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 6, Number 2, pp. 38–51). <https://doi.org/10.47971/tjpi.v6i2.815>
- Nuryanti, N., Hidayat, H., Sibaweh, I., Amin, K., & Fitri, A. (2024). Pendidikan Karakter Religius Berbasis Internalisasi Pendidikan Tauhid pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). *Journal of Education Research*, 5(4), 4348–4354. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1596>
- Patton, M. Q. (1998). Enhancing The Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt. 2), 1189–1208. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/>
- Rosadi, A., Hambali, A., & Suhartini, A. (2023). Konsep Tauhidullah sebagai Substansi Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 371–399. <https://doi.org/10.21274/taalum.2023.11.2.371-399>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Zulliandi, Y. B. (2024). The Transformation of Qur ' an Interpretation and The Dynamics of Text Authority in Indonesia : A Critical Analysis. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 04(02), 107–137.